

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Lokasi Penelitian

Desa Tanjung Lalak adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, dan dijadikan ibu kota Kecamatan Pulau Laut Kepulauan karena dirasa paling strategis dibandingkan dengan desa-desa yang lain dengan jarak ke Kecamatan kurang lebih 1 km. Desa Tanjung Lalak Utara memiliki luas wilayah 2709 Ha. Dengan didominasi oleh masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani dan buruh nelayan.

a. Batas Wilayah Desa

Utara	: Desa Oka-Oka
Selatan	: Desa Teluk Aru
Timur	: Laut Sulawesi
Barat	: Kecamatan Pulau Laut Barat

b. Topografi Desa

Secara umum keadaan topografi Desa Tanjung Lalak Utara adalah daerah yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal dipesisir pantai.

2. Kependudukan

Berdasarkan data jumlah penduduk Desa Tanjung Lalak Utara Tahun 2022, Desa Tanjung Lalak memiliki jumlah penduduk 1.537 jiwa, dengan jumlah laki-laki 760 jiwa, dan perempuan sebanyak 777 dengan 343 KK.

3. Agama

Masyarakat Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru mayoritas beragama Islam.

4. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 4.1 Data Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah
1	Kantor Desa/ Balai Desa	1
2	Gedung SMA	1
3	Gedung SMP/MTSN	2
4	Gedung SD	1
5	Gedung TK	1
6	Gedung Paud	1
7	Masjid/ Musholah	2
8	Puskesmas	1
9	TPQ	1
10	Poskamling	1

Sumber: Kantor Desa Tanjung Lalak Utara Tahun 2022

5. Kondisi Perumahan

Data kondisi rumah di Desa Tanjung Lalak Utara Kecamatan Pulau Laut Kepulauan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Persentase Kondisi Rumah Masyarakat

Klasifikasi	Jumlah
Permanen	85%
Semi Permanen	7%
Non Permanen	8%

Sumber: Data Kantor Desa Tanjung Lalak 2022

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa kondisi rumah masyarakat Tanjung Lalak Utara, terdiri dari 3 klasifikasi yaitu rumah permanen, semi permanen dan non permanen. Dimana menurut Undang-Undang Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, tipe rumah permanen adalah jenis rumah yang bahan atapnya genteng, bahan dindingnya adalah tembok dan memiliki lantai dari bahan keramik. Rumah semi permanen yaitu rumah yang terdiri dari atap seng atau asbes,

dindingnya kayu atau bambu dan bahan lantainya semen. Rumah non permanen adalah rumah yang atapnya kayu atau asbes, dindingnya bambu atau gedek dan tidak berlantai (tanah). Kondisi rumah masyarakat di Desa Tanjung Lalak Utara yaitu terdiri dari rumah permanen sebesar 85% (Delapan puluh lima persen), rumah semi permanen sebesar 7% (Tujuh persen), dan rumah non permanen sebesar 8% (Delapan persen).

6. Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan perekonomian masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan didominasi oleh pertanian dan perkebunan yaitu sekitar 38,81% disusul oleh jumlah nelayan sekitar 14,84%. Namun sebagian besar mata pencaharian masyarakat Tanjung Lalak adalah petani yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang mana membuat produksi pertanian pun tidak mengalami peningkatan. Di bidang lain, seperti pedagang/pengusaha yang mana jika mendapatkan pembinaan yang tepat kepada masyarakat akan lebih bisa berkembang sehingga tentunya akan berdampak positif pada pergerakan roda perekonomian masyarakat Tanjung Lalak di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Data Ekonomi Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)	Presentase(%)
1	Pertanian/ Perkebunan	170	38,81
2	Nelayan	65	14,84
3	Pedagang/ Pengusaha	19	4,33
4	Peternak	20	4,56
5	Buruh Sawit	80	18,26
6	Buruh Bangunan	30	6,84
7	Buruh Arang	30	6,84
8	PNS	14	3,19
9	Pensiunan PNS/ TNI	10	2,28

	Jumlah	438	100.00
--	--------	-----	--------

Sumber: Kantor Desa Tanjung Lalak Utara Tahun 2022

7. Struktur Organisasi

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA TANJUNG LALAK UTARA KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN KABUPATEN KOTABARU



Sumber: Data Primer terolah 2022

a. Visi dan Misi

Visi Desa Tanjung Lalak Utara adalah untuk menjadikan Desanya sebagai Desa yang makmur dan Sejahtera, dan Misi Desa Tanjung Lalak Utara yaitu menjadikan Desa Tanjung Lalak Utara sebagai Desa yang mandiri dengan meningkatkan sarana prasarana, infrastruktur, didukung oleh pemanfaatan potensi yang dimiliki desa dengan maksimal untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan kelompok pertanian/ perkebunan dan nelayan, meningkatkan pelayanan pemerintah

terhadap masyarakat. Serta meningkatkan mutu pelayanan terhadap kesehatan masyarakat (terutama masyarakat yang kurang mampu). Meningkatkan nilai-nilai agama dan pengamalannya, terutama kepada generasi muda sebagai penerus bangsa.

8. Kondisi Masyarakat di Desa Tanjung Lalak

Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Lalak sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan adalah hal yang sangat penting karena berfungsi untuk mengembangkan potensi setiap anak, dan dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan formal maupun non formal. Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan masyarakat Tanjung Lalak Utara Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru.

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	Penduduk Tidak Tamat SD	140	11 %
2	Penduduk Tamat SD	620	49 %
3	Penduduk Tamat SLTP	342	27 %
4	Penduduk Tamat SLTA	110	9 %
5	Penduduk Tamat Akademi	50	4 %
	Jumlah	1.262	100%

Sumber: Data Primer terolah Tahun 2022

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat desa menyatakan bahwa anak-anak usia sekolah di Desa Tanjung Lalak Utara secara keseluruhan bersekolah semua, seperti yang diterangkan berikut ini:

” Saya punya 5 anak dan mereka semua bisa sekolah, anak pertama saya meski hanya sampai tingkat SMP, tapi adik-adiknya Alhamdulillah bisa sampai tingkat SMA, yaitu anak kedua saya sudah lulus SMA, kemudian anak ketiga dan keempat masih berstatus siswa di SMA dan yang terakhir masih bersekolah di tingkat SMP” tutur Ibu Ida salah satu warga Desa Tanjung Lalak Utara”.

Dari jawaban masyarakat tersebut sudah bisa mewakilkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Tanjung Lalak Utara sudah bisa dikatakan cukup baik.

b. Tingkat Kesehatan Masyarakat

Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi, pangan, sandang dan kesehatan. Dimana pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum perkiraan kalori dan protein yaitu 2100kkal/hari. Indikator yang kedua yaitu, sandang, yang dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki dan tutup kepala. Ketiga, kesehatan yang dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk menyediakan obat-obatan dirumah, ongkos dokter dan perawat.

Tabel 4.5
Tingkat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator	Presentase
1	Angka kematian bayi	1%
2	Angka kematian ibu	0%
3	Angka harapan hidup	4%
4	Presentase persalinan oleh tangan medis	95%

Sumber: Data Kantor Desa Tahun 2022

Tabel tersebut menjelaskan bahwa taraf kesehatan masyarakat Tanjung Lalak sudah sangat baik. Hal tersebut didukung oleh seorang tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa tidak adanya penurunan kesehatan yang diakibatkan dari kekurangan gizi ataupun kematian bayi dan ibu hamil, dikarenakan hampir

seluruh masyarakat Tanjung Lalak dari segi pemenuhan gizi bisa dikatakan sudah tercukupi. Dalam proses persalinan pun, masyarakat sudah tidak menggunakan tabib (dukun bayi), masyarakat sudah beralih ke bidan, dan didukung oleh akses jalan menuju puskesmas yang sudah sangat mudah.

c. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Mayoritas penduduk Tanjung Lalak berprofesi sebagai petani dan nelayan, disebabkan dikecamatan Pulau Laut Kepulauan memiliki lahan yang luas dan juga tanah subur yang cocok untuk bercocok tanam, serta wilayah perdesaan yang berada di dekat pesisir pantai. Berikut besaran pendapatan masyarakat menurut profesi sebagai berikut:

Tabel 4.6 Tingkat Pendapatan Masyarakat

No	Jenis Profesi	Pendapatan/bulan
1	Petani	Rp500.000,00- Rp900.000,00
2	Nelayan	Rp600.000,00 - Rp1.000.000,00
3	Pedagang	Rp600.000,00 - Rp2.000.000,00

Sumber: Dokumen Desa Tanjung Lalak Utara dari Tahun (2018- 2022)

Berikut pernyataan dari beberapa Ibu rumah tangga RT. 03 Desa Tanjung Lalak Utara :

“Saya hanya seorang ibu rumah tangga dan suami saya bekerja sebagai nelayan dan juga petani, meskipun dengan jumlah penghasilan yang tidak menentu tapi bisa membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari”. (Ibu Marni).

Lalu ada juga penjelasan dari warga masyarakat yang lain yaitu dari Ibu Ila sebagai berikut:

“Suami saya sudah lama bekerja sebagai petani, dan kadang saya juga ikut membantunya tetapi karena penghasilannya yang tidak menentu jadi saya juga bekerja sebagai asisten rumah tangga dan membantu para nelayan mengelola ikannya pada musim nelayan. Alhamdulillah

penghasilan saya tersebut bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membiayai kebutuhan sekolah anak-anak saya”.

Namun tidak sedikit juga masyarakat yang memiliki pendapatan golongan sedang setiap bulannya, seperti pernyataan Ibu Nami sebagai berikut:

“Suami saya bekerja sebagai supir taksi, hampir setiap hari berangkat dari desa ke kota membawa penumpang dan barang, yah meskipun kadang full ataupun sedikit penumpang tetapi Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan keluarga kami”.

d. Komposisi Pengeluaran Masyarakat

Pada umumnya pengeluaran konsumsi digunakan untuk kebutuhan pokok untuk pemenuhan jasmani seperti makanan, namun ada juga barang konsumsi lain yang dianggap sebagai kebutuhan yang tidak kalah penting dalam menyelenggarakan rumah tangga, karena semuanya bergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga.

Konsumsi masyarakat menurut BPS, meliputi seluruh pengeluaran rumah tangga baik makanan, pendidikan, kesehatan maupun perumahan. Berikut adalah Tabel pola konsumsi masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara.

Tabel 4.7 Pola Konsumsi Masyarakat

No	Pola Konsumsi	Pengeluaran/bln
1	Pengeluaran Makan	Rp800.000
2	Pengeluaran Pendidikan	Rp500.000
3	Pengeluaran kesehatan	Rp100.000
	Total Pengeluaran	Rp1.400.000

Sumber: Hasil wawancara 2022.

e. Tingkat Perumahan Masyarakat

Menurut WHO, perumahan adalah sekelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana

lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik, misalnya penyediaan air bersih, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telfon jalan yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya.

Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa perumahan merupakan suatu lingkungan sebagai tempat tinggal, struktur fisik, atau bangunan untuk berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani, serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial maupun politik dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan berikut tingkat perumahan masyarakat Tanjung Lalak Utara berdasarkan tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 4.8 Tingkat Perumahan Masyarakat

No	Jenis Profesi	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kepemilikan Rumah	Hak Milik	Hak Milik	Hak Milik	Hak Milik	Hak Milik
2	Jumlah Rumah Per/KK	411	423	432	443	343
3	Rumah Berkualitas Baik	52%	59%	68%	73%	75%
4	Rumah Tangga Memiliki Penerangan Listrik	77%	80%	85%	86%	88%
5	Rumah yang memiliki MCK yang Baik	48%	58%	66%	68%	72%

Sumber: Dokumen Kantor Desa Tanjung Lalak Utara 2022

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua RT 04 yaitu bapak Agusriadi yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat Desa Tanjung Lalak kebanyakan memiliki status rumah milik sendiri namun juga masih ada beberapa warga yang meskipun sudah

berkeluarga tetapi memilih tinggal serumah dengan orang tua dikarenakan belum memiliki rumah atau tempat tinggal”.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa program alokasi dana desa memiliki dampak positif jika dilihat dari jumlah berkualitas baik dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 karena mengalami peningkatan sebesar 23%, hal sama juga terjadi pada tingkat penerangan listrik dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yaitu mengalami kenaikan sebesar 11%, namun lain halnya dengan fasilitas MCK masyarakat, yang terlihat masih belum cukup memadai sehingga program ADD bisa dikatakan masih belum memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat jika dilihat dari fasilitas MCK masyarakat di Desa Tanjung Lalak Utara namun mengalami peningkatan setiap tahunnya.

B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Lalak Utara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Bapak Syamsul sebagai Kepala Desa Tanjung Lalak Utara, mengenai proses pengelolaan ADD yang diberikan oleh kabupaten, beliau menyebutkan bahwa dalam proses pengelolaan ADD setiap tahunnya telah sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Pemerintah Bupati tentang Alokasi Dana Desa dimana selalu dilakukannya perbaruan. Proses pengelolaan ADD ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Kotabaru No. 02 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa.

Pengelolaan ADD di Desa Tanjung Lalak Utara meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban yang harus dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dengan memperhatikan kepatutan dan rasa keadilan. Pelaksanaan ADD di Desa Tanjung Lalak Utara oleh pemerintah desa juga melibatkan masyarakat desa setempat. Hal

ini dapat dilihat pada keikutsertaan masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara dalam proses pembangunan yang dilakukan. Dalam pelaksanaan tersebut pemerintah desa telah menyusun kepanitiaan, yang bertujuan untuk mempermudah tugas pokok dan fungsi dari masing-masing panitia.

1. Tahapan Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam Perencanaan tahapan awal yang dilakukan adalah rapat guna membahas penggunaan dana alokasi pembangunan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes adalah suatu rencana pembangunan desa dalam jangka waktu lima 5 (tahun) yang menjadi dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa. RPJMDes memuat visi dan misi kepala desa dan segala sesuatu yang akan dikerjakan kepala desa selama memimpin desa.

a. Tahap Penyusunan RPJMDes

Dalam penyusunan RPJMDes tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa dan perangkat desa tetapi melibatkan seluruh elemen yang ada di masyarakat. Dalam penyusunan dan penetapan RPJMDes memiliki beberapa tahapan:

1) Persiapan sosial

Dalam persiapan sosial ini yang dilakukan adalah:

a). Pemilihan Tim Penyusun RPJMDes

Pembina	:	Kepala Desa Tanjung Lalak Utara
Ketua	:	Sekretaris Desa Tanjung Lalak Utara
Sekretaris	:	Ardi
Coordinator	:	Herlina
Anggota	:	Alfiah
		Saramita

Musram

Ghaffar

b). Persiapan Teknis

Kegiatan ini untuk membekali pengetahuan, keterampilan dan sikap pada tim penyusun RPJMDes dalam memfasilitasi proses-proses dimasyarakat sehingga proses yang dilakukan bisa mendapat hasil yang optimal.

2) Proses Penjajakan

Proses ini dimulai dengan sosialisasi pada warga tentang rencana kegiatan penjajakan yang akan dilaksanakan. Dalam proses ini warga masyarakat lebih dulu mendiskusikan aspek-aspek yang membedakan tingkat kesejahteraan, dan membahas tentang potensi dan masalah yang ada sehingga ada gambaran awal untuk visi pembangunan desa untuk 5 tahun kedepan. Setelah dilakukan diskusi oleh masyarakat, tim melakukan penyusunan terhadap hasil diskusi tersebut sebagai berikut:

- Bidang pekerjaan umum, memiliki masalah jalanan yang rusak dan sulit untuk dilalui, banjir pada musim hujan, tanaman cabe yang kekeringan musim kemarau dengan potensi badan jalan ada, bahan material ada dan tenaga kerja yang tersedia.
- Bidang pendidikan, memiliki masalah belum ada pagar sekolah TK dan perpustakaan desa.
- Bidang kesehatan, memiliki masalah yaitu posyandu permanen belum ada dengan potensi lahan ada dan banyaknya balita.
- Bidang ekonomi, yaitu BUMDes memiliki masalah kekurangan modal untuk mengembangkan usaha dan potensi yang ada.

- Bidang sosial budaya dengan masalah kurangnya keterampilan yang dimiliki masyarakat.
- Kelembagaan desa dengan masalah pengurus PKK tidak memiliki usaha produktif yang bernilai ekonomis.

1) Proses perencanaan

Masyarakat kembali mereview visi awal pembangunan sehingga didapatkan visi pembangunan desa yang realistis, yang kemudian melalui proses final dan disepakati beberapa misi untuk mencapai visi pembangunan tersebut.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat desa, ketua dan anggota BPD, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan PKK Desa.

**Tabel 4.9 Daftar Absensi Rapat Pembentukan Tim
Penyusunan RPJMDes Tahun 2022**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Syamsul	Kades	Hadir
2.	Norsiah	Ket. Yayasan	Hadir
3.	Idris	Sekdes	Hadir
4.	Rusdi	Babinsa	Hadir
5.	Hasbullah	Kep. Puskesmas	Hadir
6.	Dzulfikar	Staf PMP	Hadir
7.	Eka Yuda Praditya	Babinsa	Hadir
8.	Musram	Ket. BUMDes	Hadir
9.	Kamilah	Bend. BUMDes	Hadir
10.	Masdar Umar	LPM	Hadir
11.	Agusriadi	LPM	Hadir
12.	Supriadi	LPM	Hadir
13.	Ardi Hidayat	Karang Taruna	Hadir
14.	Lina Hasriah	Kep. Bunga Melati	Hadir
15.	Masnur	PD P3MD	Hadir
16.	A. Gafur	RT.04	Hadir
17.	Tajudinnor	PD P3MD	Hadir
18.	Barsah	Kep. TK Melati	Hadir
19.	Sudarman	LPM	Hadir

20.	Nasaruddin	Kasi PMP	Hadir
21.	M.Yusuf	BPD	Hadir
22.	Yahya	Kep.Sek. PLK	Hadir
23.	Husain Marzuki	Tokoh Agama	Hadir
24.	Samsuri	RT.01	Hadir
25.	Herlina	Kaur Umum	Hadir
26.	Musa	Wakil BPD	Hadir
27.	Ayu Puspita Sari	Kasi Pemerintahan	Hadir
28.	Alfia	K. Perencanaan	Hadir
29.	Liskawati	Kasi Pelayanan	Hadir
30.	Mansur	RT. 05	Hadir
31.	Elyana Nurlili	Staff	Hadir
32.	Abd. Ghaffar	Ketua BPD	Hadir

Sumber: Kantor Desa Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas bisa diketahui bahwa yang hadir dalam rapat adalah sejumlah 32 orang yang diantaranya yaitu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama.

2. Tahapan Pengorganisasian Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahapan kedua yaitu untuk membahas penyusunan rencana kegiatan dana alokasi pembangunan desa dan penentuan panitia pelaksana. Pada tahapan ini juga dihadiri oleh kepala desa dan aparat desa, ketua dan anggota BPD, ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat dan PKK Desa. Panitia yang dibentuk juga akan membentuk rancangan kegiatan beserta rincian anggaran yang dibutuhkan pada tiap kegiatan yang dilakukan dan kepanitiaan yang dibentuk sebagai hasil rapat tersebut adalah sebagai berikut.

b. Penanggung Jawab: Syamsul (Kepala Desa)

c. Koordinator Pelaksana Kegiatan: Idris (Sekretaris Desa)

Dalam hal ini, bapak Idris diangkat menjadi koordinator pelaksana kegiatan dikarenakan sebagai sekretaris desa dirasa mampu untuk mengoordinasi pelaksanaan kegiatan dibantu pegawai lainnya.

- a. Bendahara: Saramita (Kaur Keuangan dan Bendahara)

Diharapkan dapat mengatur keuangan yang masuk dan keluar serta seluruh administrasi keuangannya agar tidak adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

- b. Pelaksana Kegiatan Lapangan: (Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Perekonomian dan Pembangunan)

- d. Pembantu Pelaksana Kegiatan Lapangan: Abd. Ghaffar (Ketua BPD) dan masyarakat

Setelah tahapan pembentukan kepanitiaan dilaksanakan, maka masing-masing panitia membentuk rencana kegiatan program kerja yang dihasilkan dalam musyawarah RKPDes dari tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 4.10 Pembagian Dana ADD 2018

No	Uraian	Satuan
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp283.121.100,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp78.054.000,00
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp21.649.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp21.303.000,00
Jumlah		Rp404.127.000,00

Sumber data: data primer diolah tahun 2018

Program kerja yang terealisasi dalam Bidang Penyelenggaraan dan Bidang Pemerintah Desa pada **Tahun 2018** yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, aparat desa (Rp141.521.000,00)
- b. Tunjangan pengurus BPD (Rp23.300.000,00)
- c. Operasional kantor desa (Rp65.105.000,00)
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa (Rp42.059.200,00)
- e. Kegiatan tata praja pemerintahan (Rp7.198.000,00)
- f. Operasional BPD (Rp1.187.900,00)
- g. Operasional ketua RT/RW (Rp2.750.000,00)

Jumlah anggaran yang digunakan dalam perealisasiian beberapa kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp283.121.100,00

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Tanah untuk pembangunan TK PAUD (Rp58.760.000,00)
- b. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih (Rp19.294.000,00)

Jumlah anggaran yang digunakan dalam perealisasiian beberapa kegiatan dalam bidang pembangunan desa sebesar Rp78.054.000,00.

4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Kegiatan kapasitas kader posyandu (Rp15.700.000,00)
- b. Kegiatan pembinaan RT (Rp1.325.000,00)
- c. Kegiatan pembinaan karang taruna (Rp4.624.000,00)

Jumlah anggaran yang digunakan dalam perealisasiian beberapa kegiatan dalam bidang pembangunan desa sebesar Rp21.649.000,00

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana (Rp7.282.000,00)

- b. Pengadaan buku perpustakaan desa (Rp14.021.000,00)

Jumlah anggaran yang digunakan dalam perealisasi beberapa kegiatan dalam bidang pembangunan desa sebesar Rp21.303.000,00.

Tabel 4.11 Pembagian Dana ADD 2019

No	Uraian	Satuan
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp193.408.900,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp188.204.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp35.000.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp110.260.000,00
Jumlah		Rp526.872.900,00

Sumber data: data primer diolah tahun 2019

Program kerja yang teralisasi dalam Bidang Penyelenggaraan dan Bidang Pemerintah Desa pada tahun 2019 :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, aparat desa (Rp141.521.000,00)
- b. Tunjangan pengurus BPD (Rp23.300.000,00)
- c. Operasional BPD (Rp1.187.900,00)
- d. Operasional ketua RT/RW (Rp2.750.000,00)
- e. Serobong/tenda tahap 1 unit (Rp10.000.000,00)
- f. Kipas angin maspion 3 unit (Rp3.000.000,00)
- g. Kursi kerja 4 buah (Rp1.400.000,00)
- h. Lemari kaca rak piring 1 unit (Rp2.500.000,00)
- i. Lemari kaca 2 unit (Rp7.000.000,00)
- j. Laptop asus silver 1 unit (Rp600.000,00)
- k. Printer epon 1 unit (Rp1.800.000,00)

l. Mikrofon krezt 5 unit (Rp2.500.000,00)

m. AC 1 unit (Rp6.000.000,00)

n. Meja kerja 5 unit (Rp3.750.000,00)

Jumlah anggaran yang digunakan dalam perealisasiian beberapa kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp193.408.900,00

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Pembangunan siring jalan lingkungan RT.05 dan RT.02, 2 unit (Rp48.137.000,00)

b. Rehabilitas sumber air bersih RT.01 (Rp21.054.000,00)

c. Pembangunan jembatan milik desa RT.01, (Rp53.110.000,00)

d. Pembangunan siring lapangan sepak bola RT.04 (Rp24.466.000,00)

e. Rehab/peningkatan TK PAUD/Melati (Rp41.437.000,00)

Jumlah anggaran yang digunakan dalam perealisasiian beberapa kegiatan dalam bidang pembangunan desa sebesar Rp188.204.000,00.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Kegiatan pembinaan PKK (Rp3.750.000,00)

b. Pembinaan pemuda karang taruna (Rp3.215.000,00)

c. Peningkatan kapasitas kader posyandu (Rp16.670.000,00)

d. Pembinaan aparatur desa (Rp3.266.000,00)

Jumlah anggaran yang digunakan dalam perealisasiian beberapa kegiatan dalam bidang pembinaan masyarakat desa sebesar Rp26.901.000,00.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Kegiatan karang taruna turnamen antar dusun (Rp12.230.000,00)

b. Kegiatan pembinaan keagamaan (Rp6.280.000,00)

c. BUMDes (Rp 84.000.000,00)

d. Pelatihan pengurus (Rp7.750.000,00)

Jumlah anggaran yang digunakan dalam perealisasi beberapa kegiatan dalam bidang pembangunan desa sebesar Rp110.260.000,00.

Tabel 4.12 Pembagian Dana ADD 2020

No	Uraian	Satuan
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp189.658.900,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp229.240.000,00
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp47.900.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp121.700.000,00
Jumlah		Rp589.508.900,00

Sumber data: data primer diolah tahun 2020

Program kerja yang terealisasi dalam Bidang Penyelenggaraan dan Bidang Pemerintah Desa pada tahun 2020 :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, aparat desa (Rp141.521.000,00)
- b. Tunjangan pengurus BPD (Rp23.300.000,00)
- c. Operasional BPD (Rp1.187.900,00)
- d. Operasional ketua RT/RW (Rp2.750.000,00)
- e. Printer canon pixma MX 497 dan printer epson L 360 (Rp4.000.000,00)
- f. Kursi kerja (Rp450.000,00)
- g. Printer canon pixma E410 (Rp4.000.000,00)
- h. Kipas angin maspion (Rp1.000.000,00)
- i. Laptop asus black (Rp15.450.000,00)

Jumlah anggaran yang digunakan dalam perealisasi beberapa kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp189.658.900,00.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- a. Rehabilitasi atap perpustakaan RT.05 (Rp111.765.000,00)
- b. Pembuatan jaringan komunikasi informasi lokal desa (Rp66.875.000,00)
- c. Pengadaan kawat duri (Rp50.600.000,00)

Jumlah anggaran yang digunakan dalam perealisasi beberapa kegiatan dalam bidang pembangunan desa sebesar Rp229.240.000,00

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Tunjangan Imam Desa, Imam Dusun Rawatib/Mesjid dan Guru Mengaji (Rp47.700.000,00)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pertanian dan peternakan (Rp121.642.000,00)

Tabel 4.13 Pembagian Dana ADD 2021

No	Uraian	Satuan
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp168.758.600,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp37.115.000,00
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp57.000.000,00
4	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp124.000.000,00
Jumlah		Rp386.873.600,00

Sumber data: data primer diolah tahun 2021

Program kerja yang terealisasi dalam Bidang Penyelenggaraan dan Bidang Pemerintah Desa pada tahun 2021 :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, aparat desa (Rp141.521.000,00)

- b. Tunjangan pengurus BPD (Rp23.300.000,00)
- c. Operasional BPD (Rp1.187.900,00)
- d. Operasional ketua RT/RW (Rp2.750.000,00)

Jumlah anggaran yang digunakan dalam perealisasiian beberapa kegiatan dalam bidang pembangunan desa sebesar Rp168.758.600,00

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- a. Pembangunan jembatan milik desa (Rp.37.115.000,00)

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Belanja bantuan perikanan yang diserahkan kepada masyarakat (Rp57.000.000,00)

4. Bidang Penanggulangan Bencana

- a. Keadaan mendesak, BLT (Rp124.000.000,00)

Tabel 4.14 Pembagian Dana ADD 2022

No	Uraian	Satuan
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 493.205.647,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 313.179.000,00
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 45.000.000,00
4	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 364.362.546,27
Jumlah		Rp 1.215.747.193,00

Sumber data: data primer diolah tahun 2022

Program kerja yang terealisasi dalam Bidang Penyelenggaraan dan Bidang Pemerintah Desa pada **Tahun 2022** :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, aparat desa (Rp141.521.000,00)
- b. Tunjangan pengurus BPD (Rp23.300.000,00)

- c. Operasional BPD (Rp1.187.900,00)
- d. Operasional ketua RT/RW (Rp2.750.000,00)
- e. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa (Rp55.806.581,00)
- f. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (Rp6.503.400,00)
- g. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan (Rp31.403.375,00)

Jumlah anggaran yang digunakan dalam perealisasiian beberapa kegiatan dalam bidang pembangunan desa sebesar Rp206.665.675,00).

2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa

- a. Sub bidang pendidikan (Rp75.000.000,00)
- b. Sub bidang kesehatan (Rp53.179.000,00)

Jumlah anggaran yang digunakan dalam perealisasiian beberapa kegiatan dalam bidang pembangunan desa sebesar Rp128.179.000,00

3. Bidang pemberdayaan masyarakat

- a. Sub bidang pertanian dan peternakan (Rp40.000.000,00)

4. Bidang penanggulangan bencana

- a. Sub bidang penanggulangan bencana (Rp33.162.546,27)

Berdasarkan data tersebut, hasil yang diperoleh di Desa Tanjung Lalak Utara rata-rata dapat dibuktikan secara fisik. Evaluasi pelaksanaan rencana ADD juga memandu masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan komentar dan koreksi atas pelaksanaan ADD. Prinsip partisipasi pun terwujud dengan pelaksanaan ADD yang mengikutsertakan masyarakat. Selain itu forum evaluasi

rencana yang sudah dilaksanakan juga menerapkan prinsip transparansi yang dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa berikut :

“Hal mendasar yang kami lakukan adalah melakukan musyawarah dusun yang dilakukan oleh setiap kepala dusun di dusunnya masing-masing yang diawasi langsung BPD dalam rangka untuk menyusun kebutuhan RPJMDes (rencana pembangunan jangka menengah desa) selama 6 tahun kedepan untuk memasukan visi misi kepala desa dan kegiatan lainnya yang nantinya akan kami masukan kedalam yang namanya APBDes yang menjadi tugas setiap tahunnya, dan nantinya setelah musyawarah dusun berlangsung kemudian kami melakukan musyawarah desa dengan mengundang semua elemen masyarakat desa untuk membahas lebih lanjut pembangunan desa dengan mendengarkan semua masukan dan aspirasi masyarakat desa serta membentuk panitia penyusun APBDes selama setahun kedepannya” (Syamsul selaku Kepala Desa).

Pernyataan tersebut senada dengan wawancara bersama sekretaris desa Tanjung Lalak Utara, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk menambahkan apa yang menjadi pernyataan dari Kepala desa mengenai perencanaan pembangunan desa, selanjutnya kami akan melaksanakan atau membentuk tim yang menyusun rencana kerja pemerintah desa satu tahun kedepan, kewajiban desa untuk melaksanakan atau merealisasikan ADD itu sendiri adalah dalam rangka menyusun dulu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) setelah selesai menyusun RKP baru kami akan menyusun APBDes setiap tahunnya, sehingga aspirasi masyarakat akan tercover dalam APBDes itu sendiri”” (Idris selaku Sekretaris Desa).

Pernyataan tersebut juga berhubungan dengan wawancara oleh ketua BDP Desa Tanjung Lalak utara, pernyataan dari beliau mengatakan bahwa:

“Kami selaku BPD akan menyelenggarakan musyawarah desa dalam tahap perencanaan kemudian akan melaksanakan rapat secara internal bagaimana tata cara pelaksanaan pembangunan di lapangan”” (Mukhlis selaku Ketua BPD).

Adapun pernyataan dari Ketua BUMDes Desa Tanjung Lalak Utara yang diwawancarai di sekretariat BUMDes, beliau mengatakan bahwa:

“BUMDes selaku sebagian dari pada desa yang berfungsi sebagai penggerak ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat selalu

memberikan masukan pada saat forum musyawarah desa dan tentu harapan kami selaku BUMDes harapan dan aspirasi kami diterima oleh pihak pemerintah dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat apalagi saat ini masuk pada transisi dari masalah pandemi itu sendiri”” (Musram selaku Ketua BUMDes Desa Tanjung Lalak).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas bisa disimpulkan bahwa, setiap aparat desa itu ikut andil dalam musyawarah desa dalam rangka membahas serta membantu menyusun perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang tersusun dalam yang namanya APBDes itu sendiri.

Tabel 4.15
Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Tanjung Lalak Utara Tahun 2022

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI	
1.	2.		Keluaran	Anggaran (Rp)	Keluaran	Anggaran (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		493.205.647		93.713.356
	2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		313.179.000		313.179.000
	3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		45.000.000		40.000.000
	4.	Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak desa.		364.362.546,27		364.362.546,27

Sumber data: data primer diolah tahun 2022

3. Proses Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tahap pelaksanaan dimulai setelah APBDesa pada tahap perencanaan telah disetujui. Dalam tahap ini akan menimbulkan penerimaan dan pengeluaran kas desa. Penerimaan dan pengeluaran Alokasi Dana Desa harus melalui rekening

kas desa dan menyertakan bukti lengkap yang sah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Langkah pertama yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yaitu mengajukan rincian anggaran belanja dan surat permintaan pembayaran kepada sekretaris desa untuk mendapatkan konfirmasi kemudian dilaporkan kepada kepala desa untuk disetujui. Setelah di konfirmasi dan disetujui oleh sekretaris dan kepala desa maka SPP sudah bisa dicairkan oleh bendahara desa yang kemudian akan dilakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi.

Seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa berikut:

“Setelah kami melakukan musyawarah desa selanjutnya kami menjalankan dari apa yang telah disepakati dalam forum musyawarah desa tersebut. Dalam proses pelaksanaan pembangunan desa ini akan diawasi langsung oleh pihak BPD selaku badan pengawas desa yang memiliki kewenangan mutlak.” (Syamsul selaku Kepala Desa)

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan kami akan sinkronkan apa yang menjadi hasil dari musyawarah desa yang tersusun dalam APBDes. Kemudian yang akan bertanggungjawab dalam mengawasi dalam pelaksanaan pembangunan itu adalah dari pihak BPD di setiap bidang itu sendiri” (Idris selaku Sekretasi Desa).

Kemudian pernyataan tersebut berhubungan dengan hasil wawancara dengan informan yang diwawancarai di Kantor Desa, beliau mengatakan bahwa:

“ketika dalam pelaksanaan pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa akan turun langsung ke lokasi kegiatan misalnya dalam pembangunan secara fisik jadi kami pihak BPD akan memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan desa itu sesuai dengan hasil perencanaan pembangunan desa itu sendiri” (Abd.Ghaffar selaku Ketua BPD Desa Tanjung Lalak utara).

Adapun hasil wawancara dengan informan di sekretariat BUMDes Desa Tanjung Lalak Utara, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan bagian dari tugas kami dengan mengelola sebagian Alokasi Dana Desa untuk di jadikan usaha maupun untuk mengelola hasil-hasil kreativitas masyarakat desa supaya mampu diterima oleh khalayak umum nantinya”” (Musram selaku ketua BUMDes Desa Tanjung Lalak Utara).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas mengenai proses pelaksanaan pembangunan desa dapat disimpulkan bahwa, dalam proses pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri sudah dilakukan sesuai rencana kegiatan pemerintahan yang tersusun dalam APBDes dari hasil musyawarah desa. Kemudian yang akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan itu melibatkan berbagai oknum dari partisipasi masyarakat sampai pada pengawasan yg dilakukan oleh BPD Desa Tanjung Lalak Utara tersebut.

Tabel 4.16 Rancangan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Desa Tanjung Lalak Utara

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI	
			Keluaran	Anggaran (Rp)	Keluaran	Anggaran (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2.1	Sub Bidang Pendidikan		16.400.000		6.000.000
	2.2	Sub Bidang Kesehatan		270.800.000		211.843.000
	2.3	Sub Bidang Pekerja Umum dan Penata Ruang		24.000.000		24.000.000
	2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		150.565.100		28.500.000
	2.5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		14.060.000		14.060.000

Sumber data: data primer diolah tahun 2022

4. Proses Pengawasan Pembangunan Desa

Pengawasan pembangunan desa merupakan upaya mengawasi jalannya program pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat yang hendak dilakukan oleh pemerintah desa. Proses pengawasan ini diawasi langsung oleh pihak yang memiliki kewenangan mutlak dalam hal ini adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa yang mengatakan bahwa:

“terwujudnya pelaksanaan peran dan fungsi BPD secara maksimal di Desa Tanjung Lalak Utara khususnya pengawasan pada setiap tahunnya dalam penyusunan rencana kegiatan dari pembangunan desa dikarenakan ada kerjasama yang baik antara Kepala Desa beserta aparat desa yang kooperatif dan menjadikan BPD sebagai mitra kerja yang solid sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik serta menghasilkan produk-produk berupa aturan desa ataupun produk yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku”” (Syamsul selaku Kepala Desa Tanjung Lalak Utara).

Pernyataan tersebut senada dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

“BPD melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa. Tahapan penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa merupakan tahapan yang sangat penting dimana jika perencanaan yang dibuat tidak sesuai dengan peruntukan maka secara otomatis hasil dari perencanaan tersebut tidak dapat dilaksanakan, disinilah peran BPD untuk mengawasi tahapan dalam penyusunan rencana kegiatan dari Alokasi Dana Desa agar program dan kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan peruntukan penggunaan Alokasi Dana Desa dan program dan kegiatan tersebut benar-benar aspirasi dari masyarakat serta merupakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk segera dilakukan”” (Idrus selaku Sekretaris Desa Tanjung Lalak Utara).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD yang mengatakan bahwa :

“berawal dari tugas pokok dan fungsi dari BPD itu sendiri bahwa BPD memiliki fungsi mengawasi kinerja kepala desa. Dalam melakukan

pengawasan, tubuh BPD terbagi menjadi beberapa bagian mulai dari pimpinan sampai pada bagian-bagian terkecil dibawahnya. Dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas kinerja kepala desa pihak BPD terlebih dahulu akan diberikan semacam Bimtek untuk mengetahui ataupun membagi kinerja masing-masing bidang sehingga tidak campur aduk dalam melakukan pengawasan. BPD juga sudah melakukan pengawasan terhadap kepala desa mulai pada perencanaan sampai pada tahap evaluasi kinerja kepala desa dalam membangun ataupun memberdayakan masyarakat desa. (Abd. Ghaffar Selaku Ketua BPD Desa Tanjung Lalak Utara).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas bisa disimpulkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa adalah dimana BPD itu bertugas untuk mengawasi berlangsungnya dari penyusunan perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan. Pengawasan tersebut untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses dimana masyarakat yang akan menjadi objek untuk kemajuan desa akan tetapi dalam mengsucceskan program pemberdayaan desa ini masyarakat perlu ikut andil dalam membantu program desa ini supaya apa yang direncanakan terealisasi dengan baik dan terlebih tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa yang mengatakan bahwa :

"dimana Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan, karena Kepala Desa di berikan hak otonom untuk menyejahterakan masyarakatnya. Dalam memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa adalah sebagai fasilitator untuk menyediakan segala kebutuhan yang ada di desa dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat secara kelembagaan masyarakat yang ada di Desa Tanjung Lalak Utara"(Syamsul selaku Kepala Desa Tajung Lalak Utara).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Tanjung Lalak Utara, beliau mengatakan bahwa:

"kami selaku BPD akan terus mengawasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, supaya apa yang menjadi tujuan awal dari pemberdayaan masyarakat itu sesuai dengan tujuan sebelumnya, ketika dalam pelaksanaan tersebut melenceng dari rancangan awal maka kami selaku Badan Permusyawaratan Desa itu langsung menegur secara lisan atau tertulis" (Abd. Ghaffar selaku Ketua BPD Desa Tanjung Lalak Utara).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Sekretariat BUMDes Desa Tanjung Lalak Utara mengatakan bahwa :

"yang kami programkan dalam upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa yaitu dengan memberikan anggaran dana desa untuk dimanfaatkan ataupun dikelola langsung oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam upaya membantu meringankan beban tugas dari pemerintah desa". (Musram selaku Ketua BUMDes).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas yang bisa disimpulkan adalah dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan desa itu sudah berjalan semestinya dari pembinaan, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial dan kebudayaan. Pihak BUMDes juga dalam meningkatkan masyarakat sehingga masyarakat kedepannya akan bisa mandiri dengan cara meminjamkan modal usaha ataupun modal bertani yang dimana itu diperuntukan kepada masyarakat yang ekonominya perlu diperhatikan.

**Tabel 4.17 Rancangan Bidang Pemberdayaan Desa
Tanjung Lalak Utara**

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI	
			Keluaran	Anggaran (Rp)	Keluaran	Anggaran (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		12.400.000		5.210.000

	4.5	Sub Bidang Perdagangan		22.800.000		5.400.000
--	-----	------------------------	--	------------	--	-----------

Sumber data: data primer diolah tahun 2022

C. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Lalak Utara Terhadap Kesejahteraan di Desa Tanjung Lalak Utara Kabupaten Kotabaru

Penelitian yang dilakukan adalah analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Lalak Utara. Analisis pengelolaan ini perlu dilakukan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Lalak Utara dalam perspektif ekonomi Islam.

Desa Tanjung Lalak Utara merupakan desa yang memiliki pendapatan ADD terbesar di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan yaitu sebesar Rp404.128.000,00 namun masyarakatnya masih memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Perolehan ADD yang tinggi di Desa Tanjung Lalak Utara harusnya mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat untuk dikembangkan menjadi lebih baik dan mengoptimalkan pembangunan, agar masyarakat bisa mandiri dan mampu menciptakan kesejahteraannya secara mandiri pula.

Dalam rangka pengoptimalan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan dan pembangunan haruslah melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapnya baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap tersebut bertujuan agar masyarakat

paham dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Analisis pengelolaan ADD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tahapan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahannya atau penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Sehingga akan tampak sejauh mana pengelolaan ADD dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Lalak Utara.

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Edi Suharto (2014:17) menyatakan perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan. Perencanaan disusun mengikuti siklus atau tahapan yang berulang. Carey dalam Suharto (2014:75) menyatakan ada lima (5) tahapan yang menjadi garis besar dalam perencanaan sosial meliputi: a) Identifikasi masalah; b) Penentuan tujuan; c) Penyusunan dan pengembangan rencana program; d) Pelaksanaan program dan e) evaluasi program.

Tahap awal dari pengelolaan keuangan desa adalah tahap perencanaan. Perencanaan merupakan langkah utama yang dilakukan oleh pemerintah desa agar penyusunan APBDesa dengan kebutuhan masyarakat desa serta potensi yang dimiliki desa sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Dalam menyusun perencanaan, pemerintah desa wajib melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan desa dan juga untuk mengawasi langsung proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Tanjung Lalak Utara dapat dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Tanjung Lalak Utara yang berpengaruh di desa seperti tokoh-tokoh masyarakat , lembaga adat, tokoh agama, RT dan masyarakat dalam hal menyumbang ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan, seperti pembangunan jalan, pembuatan sumur bor, perbaikan sarana dan prasarana, yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Tanjung Lalak Utara telah berjalan dengan baik.

2. Proses Pengorganisasian Alokasi Dana Desa

Proses penentuan panitia pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa dihadiri oleh kepala desa dan aparat desa, ketua dan anggota BPD, ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat dan PKK desa. Dengan diperolehnya hasil dari pembentukan kepanitiaan tersebut, maka masing-masing panitia membentuk rencana kegiatan program kerja yang dihasilkan melalui rapat RKP Desa dan melakukan tanggungjawab masing-masing panitia pelaksana yang diawasi oleh BPD agar lebih baik berjalannya proses pelaksanaan nantinya. Dengan demikian tahapan pengorganisasian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa telah berjalan dengan baik.

3. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Lalak Utara dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dimulai pada tahap pencairan dana. Pencairan dana ADD dilakukan tiga tahap dengan pencairan pada tahap pertama dana yang dicairkan sebesar 20% dari anggaran yang diterima. Pada tahap kedua pencairan dana ADD sebesar 40% dan tahap ketiga pencairan dana sebesar 40%. Dengan mengajukan surat permohonan pencairan dana melalui Kecamatan, lalu ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), setelah itu ke Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (BKUD) lalu masuk ke Bank BPD. Kemudian ditandatangani oleh Pemerintah Desa, Kecamatan, Dinas PMD dan BKUD. Masing-masing dari pihak tersebut bertandatangan atas surat permohonan tersebut. Pencairan dana ADD tahap 2 dilakukan apabila pengerjaan kegiatan pada pencairan dana selanjutnya.

Dalam pembangunan fisik Desa Tanjung Lalak Utara dapat dilihat pada hasil wawancara penelitian bahwa pengelolaan yang dilakukan dari Tahun 2018 sampai tahun 2022 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan sebelumnya yaitu diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang mempunyai peranan penting bagi suatu instansi, setelah penganggaran maka dilanjutkan

dengan penatausahaan yaitu proses penginputan penerimaan data pengeluaran desa, dilakukan secara berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi yang dilakukan. Sistem pelaporan yang digunakan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa terbagi atas 2 bentuk, yaitu siskeudes dan dalam bentuk laporan LPJ manual.

a. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Siskeudes adalah alat atau sistem yang digunakan dalam mengelola keuangan desa, berupa realisasi anggaran dan APBDes. Aplikasi siskeudes mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, *user friendly* dan *desktop application* serta memiliki sistem pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Dengan penggunaan aplikasi siskeudes tersebut dapat membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan kepada badan keuangan daerah.

b. Laporan pertanggungjawaban secara manual

Laporan pertanggungjawaban secara manual dilakukan oleh pemerintah desa dengan membuat laporan yang kemudian di print dan akan dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait. Laporan ini diberikan kepada pihak kecamatan, pihak inspektorat, pihak Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan pihak keuangan. Laporan pertanggungjawaban ini juga dipegang oleh Kepala Desa dan sebagai pertanggungjawaban desa terhadap Badan Permusyawaratan Desa dan kepada masyarakat.

4. Proses Pengawasan Pembangunan Desa

Dari hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu bertugas untuk mengawasi berlangsungnya dari penyusunan perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan. Pengawasan tersebut untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Pemerintah desa melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa wajib untuk menyampaikan laporan yang bersifat periodik, yaitu semesteran dan tahunan yang akan disampaikan ke bupati/walikota.

Berdasarkan hasil penelitian laporan pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik Desa Tanjung Lalak Utara sudah dilaporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggungjawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik oleh pemerintah desa. Pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa, yang kemudian dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan baik.

Kesejahteraan masyarakat bisa diukur melalui beberapa indikator yaitu: tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, komposisi pengeluaran masyarakat, dan tingkat perumahan masyarakat dimana indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam program ADD. Berdasarkan hal tersebut, maka bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.18
Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dari Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Keterangan
Tingkat Pendidikan	60%	67%	74%	77%	79%	Mengalami Peningkatan
Tingkat Kesehatan Masyarakat	Persalinan Tangan Medis 83%	87%	91%	94%	96%	Mengalami Peningkatan
Tingkat Pendapatan	Rp500.000-Rp700.000	Rp500.000-Rp800.000	Rp500.000-Rp900.000	Rp600.000-Rp1.000.000	Rp600.000-Rp1.000.000	Mengalami Peningkatan
Pengeluaran Masyarakat	Rp600.000	Rp600.000	Rp650.000	Rp700.000	Rp800.000	Mengalami Peningkatan
Tingkat Perumahan	57%	79%	81%	81%	87%	Meningkat 18 %

Sumber: Dokumen Kantor Desa Tanjung Lalak Utara tahun 2022

Jika dilihat dari indikator kesejahteraan yaitu sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan

Dari hasil penelitian tingkat pendidikan di Desa Tanjung Lalak Utara dari tahun 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2022, ADD yang dialokasikan dibidang pendidikan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 150.000.000,00 digunakan untuk memperbaiki fasilitas PAUD dan bonus buat para guru pengajar yang mengajar didesa tersebut. Seperti yang kita ketahui setiap tahunnya ada saja anak-anak desa yang putus sekolah, mereka lebih memilih untuk membantu perekonomian orang tuanya. Adanya ADD tersebut membangkitkan semangat anak-anak desa serta orang tuanya yang menginginkan mereka mengenyam pendidikan namun terhalang dana. Dengan itu ADD memiliki dampak positif dan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat desa Tanjung Lalak Utara.

b. Tingkat Kesehatan

Taraf kesehatan masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara secara umum sudah cukup baik, dimana jumlah anggaran ADD yang disalurkan dibidang kesehatan untuk tahun 2022 sejumlah Rp163.179.000,00 digunakan untuk perbaikan sanitasi air bersih dan sudah ada puskesmas dan juga beberapa posyandu juga di desa ini yang membuat taraf kesehatan masyarakatnya semakin baik. Hal tersebut juga ditegaskan oleh seorang tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai bidan yaitu Ibu Aisyah yang mengatakan bahwa tingkat kesehatan masyarakat Desa Tanjung Lalak cukup baik karena tidak adanya penurunan kesehatan yang diakibatkan dari kekurangan gizi ataupun kematian bayi dan ibu hamil, dikarenakan hampir seluruh masyarakat Tanjung Lalak dari segi pemenuhan gizi bisa dikatakan sudah tercukupi. Dalam proses persalinan pun, masyarakat sudah tidak menggunakan tabib (dukun bayi), masyarakat sudah beralih ke bidan, dan didukung oleh akses jalan menuju puskesmas yang sudah sangat mudah, dan banyak masyarakat desa yang mengikuti program KB sehingga Desa Tanjung Lalak pun dikenal sebagai Desa Kampung KB.

c. Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh baik dari kepala rumah tangga maupun dari anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan tinggi dengan jumlah pendapatan >Rp 5.000.000, golongan sedang dengan jumlah pendapatan Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000, dan golongan rendah dengan jumlah pendapatan <Rp 1.000.000. Masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara

sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan, selain itu juga masyarakat punya pekerjaan lain seperti PNS dibidang pendidikan, peternak, pedagang, karyawan, buruh dan lain sebagainya.

Banyak dari petani ataupun nelayan yang memiliki pekerjaan sampingan, hal tersebut dilakukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari namun ada juga masyarakat yang hanya mengandalkan hasil panennya ataupun hasil tangkapan dari nelayannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti dengan informan-informan yang ada di Desa Tanjung Lalak Utara yaitu dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat penghasilannya mencapai sekitar Rp500.000-Rp900.000 setiap bulannya. Dengan masyarakat desa didominasi oleh petani dan nelayan maka bisa dikatakan masih banyak masyarakat yang pendapatannya tergolong rendah.

Dalam hal ini, Program ADD dinyatakan belum membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dilihat dari jumlah pendapatan masyarakat rendah yaitu <Rp1.000.000 perbulan, dan juga program ADD serta pengelolaannya di Desa Tanjung Lalak Utara ini hanya beberapa program pemberdayaan ekonomi masyarakat saja berupa kelompok tani, dan kelompok nelayan yang pengelolaannyapun masih kurang dikelola dengan baik sehingga secara ekonomi belum dapat memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Seharusnya dari program ADD digunakan untuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan pembuatan industri rumah tangga kreatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

d. Komposisi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga keluarga. Dapat dikatakan bahwa rumah tangga sejahtera bila presentase pengeluaran jauh lebih kecil dibandingkan dengan presentase pengeluaran untuk non makanan atau <80 % dari pendapatan. Masyarakat Tanjung Lalak Utara mayoritas petani yang mengandalkan musim panen sehingga tingkat pendapatan masyarakat jadi tidak menentu, jika pendapatan mereka tinggi maka konsumsi akan tercukupi dengan baik, namun jika pendapatan sedikit maka hanya untuk kebutuhan pangan saja. Pada umumnya pengeluaran konsumsi masyarakat sekitar Rp30.000.- Rp50.000 perhari, dan ini belum termasuk dalam biaya kesehatan, pendidikan, perumahan serta pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor dan lain-lain.

e. Tingkat Perumahan

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10 m² dan bagian terluas rumah bukan tanah, dan status penguasaan tempat tinggal adalah milik sendiri.

Tingkat perumahan masyarakat Tanjung Lalak Utara dilihat dari data yang ada sudah sekitar 91% yang memiliki rumah hak milik sendiri dan hanya sebagian kecil saja yang masih berstatus rumah bukan milik sendiri maupun rumah sewa. Keadaan rumah yang berkualitas atau disebut dengan rumah permanen yaitu sebanyak 292 rumah atau (85%), rumah semi permanen sebanyak 24 rumah (7%), dan rumah non permanen sejumlah 27 rumah (8%). Selain itu secara keseluruhan, masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara sudah punya MCK yang memiliki sanitasi yang baik di setiap rumah namun masih ada juga yang MCK nya kurang memadai

sehingga perlu adanya peninjauan kembali dan bantuan dari pemerintah dalam hal tersebut.

Beberapa indikator yang telah dijelaskan, telah menunjukkan bahwa alokasi dana desa berdampak positif bagi masyarakat sekitar seperti terpenuhinya kebutuhan air bersih, namun beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang ada belum terpenuhi dengan baik oleh program alokasi dana desa di Desa Tanjung Lalak Utara, hanya indikator tingkat kesehatan yang mengalami peningkatan cukup baik dari program ADD ini seperti program untuk saluran sanitasi yang bersih dan pembuatan gorong-gorong sehingga masalah saluran sanitasi menjadi lebih baik dan lebih sehat dari tahun ke tahun. Kemudian untuk tingkat pendidikan masyarakat juga terlihat dampak positif dari program ADD, karena program yang berhubungan dengan pendidikan sudah menyentuh masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara sudah hampir 50% yang lulus SMA dan melanjutkan keperguruan tinggi, namun perlu lebih di tingkatkan lagi. Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendapatan masih belum bisa dikatakan sejahtera, oleh karena itu peran pengelolaan ADD yang tepat sangat dinantikan oleh masyarakat demi perubahan kondisi ekonomi sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat.

Akan tetapi, jika dilihat dari pengelolaan ADD di Desa Tanjung Lalak Utara, tujuan Alokasi Dana Desa ini belum tersentuh secara menyeluruh. Dari tujuan ADD yang baru dirasakan oleh masyarakat adalah pembangunan infrastruktur desa, peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial, ini

terlihat dari program-program di Desa yang di alokasikan untuk ibu-ibu PKK yang digunakan untuk pengajian.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa tujuan dari program Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Lalak Utara ini yang dapat dikatakan tercapai yaitu peningkatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pengamalan nilai keagamaan sosial budaya. Sedangkan peningkatan pendapatan desa dan masyarakat belum tercapai secara menyeluruh, karena terkendalanya dana yang masih kurang. Aparatur desa belum memprioritaskan kegiatan ekonomi sebagai salah satu program dari alokasi dana desa dan lebih memprioritaskan pembangunan gorong-gorong, perbaikan jalan, dan sinitasi air bersih yang masih kurang sehingga itulah yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat.

E. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Lalak Utara menurut Perspektif Ekonomi Islam

Islam mengajarkan kepada kita tentang studi pengelolaan atau manajemen secara jelas terperinci dalam Al-Qurán dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindak lanjuti berbagai macam permasalahan hidup sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Ar –Rad/13: 11:

لَهُ ۥ مُعَقَّبَاتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ ۚ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وََمَا لَهُمْ مِّنۭ دُونِهِ ۚ مِنْ وَّآلِ ١١

.... “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri....”

Manusia dituntut untuk melakukan suatu pekerjaan secara optimal, karena setiap proses adalah gambaran dari suatu hasil yang diperoleh, begitupun dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara tidak akan tercapai jika tidak didasari pengelolaan yang baik dalam pengelolaan Alokasi Dana Desanya melalui program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Desa Tanjung Lalak Utara Kabupaten Kotabaru. Pelaksanaan dan dampak dari Alokasi Dana Desa 2018 sampai dengan 2022 di Desa Tanjung Lalak Utara dalam perspektif ekonomi Islam sudah sesuai dengan QS. Ar-Rad ayat 11 diatas karena pemerintah Desa Tanjung Lalak Utara dalam pengelolaan Alokasi Dana Desanya telah menyediakan manfaat bagi masyarakat berupa kelompok usaha tani dan nelayan yang bertujuan untuk membantu menyejahterakan perekonomian Desa Tanjung Lalak Utara, dan masyarakat pun bisa merasakan manfaatnya, sehingga bisa dikatakan telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Walaupun masih terkendala dengan jumlah ADD yang minim.

1. Faktor Kendala dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Beberapa hal yang menjadi kendala bagi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Lalak Utara yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya mengalami perubahan, ini menjadi hambatan dalam mengelola keuangan desa.
- b. Jumlah Alokasi Dana Desa yang masih minim.

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Lalak Utara

Kabupaten Kotabaru

Dari hasil penelitian melalui indikator yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walau masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara masih memiliki pendapatan yang rendah namun setiap tahunnya pendapatan juga semakin meningkat dan dari ke empat indikator lain juga mengalami peningkatan yang bisa mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat.